

Kebijakan Pendidikan Mendorong Kepemilikan Industri Dan Otonomi Pendidikan Vokasi

Joulanda Altje Meiske Rawis¹, Roos M.S Tuerah², Rafly Muhammad Nur³, Imanuel W. E. Taroreh⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: jolandarawis@unima.ac.id, roostuerah@gmail.com, muhamadraflyrafly3@gmail.com, imanuelwillem17@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 02 Februari 2026

Keywords: kebijakan pendidikan, perbaikan kurikulum, pedagogik, penilaian, Indonesia

Abstract: Kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri guna meningkatkan relevansi dan kualitas lulusan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mendorong kepemilikan industri dalam proses pendidikan, baik melalui penyusunan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik, maupun keterlibatan langsung dalam pengelolaan lembaga vokasi. Selain itu, kebijakan otonomi pendidikan vokasi memberikan ruang bagi sekolah maupun perguruan tinggi vokasi untuk lebih fleksibel dalam merancang program sesuai kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Sinergi antara kepemilikan industri dan otonomi vokasi diharapkan dapat menciptakan lulusan yang kompeten, adaptif, serta siap kerja, sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional maupun global. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berakarakter, dan berdaya saing untuk mencapai kemajuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (AlMubarak & Mustofa, 2025). Arah kebijakan pendidikan saat ini mencakup percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran melalui teknologi, pemenuhan pendidikan vokasi, penguatan kualitas pendidik, dan penataan tata kelola pendidikan yang lebih baik.

Berbicara soal sektor industri yang luas mencakup berbagai jenis, mulai dari industri pengolahan (manufaktur), industri jasa, hingga industri primer seperti pertanian. Industri memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perkembangan teknologi (Yasin, 2024).

Otonomi pendidikan Vokasi adalah hal yang penting untuk meningkatkan link and match dengan industri, menjawab tantangan ekonomi, dan menghasilkan lulusan yang siap kerja (Ningrum, 2025). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya link and match dengan industri, ketersediaan SDM yang kompeten, serta stigma sosial terhadap pendidikan vokasi, yang perlu diatasi melalui kerja sama antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan

vokasi berfokus pada revitalisasi dan kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan vokasi dan industry (Saptadi *et al.*, 2025). Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang terintegrasi, menghasilkan lulusan yang siap kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat di rumuskan dalam melakukan penelitian ini, seperti:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan nasional berperan dalam mendorong keterlibatan dan kepemilikan industri terhadap pendidikan vokasi?
2. Sejauh mana otonomi lembaga pendidikan vokasi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja sama dengan dunia industri?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kolaborasi antara lembaga vokasi dan industri?
4. Bagaimana model kebijakan yang ideal untuk menyeimbangkan kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi agar mampu meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja?

Dari rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini, seperti:

1. Menganalisis peran kebijakan pendidikan nasional dalam mendorong keterlibatan dan kepemilikan industri terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi.
2. Menilai pengaruh otonomi lembaga pendidikan vokasi terhadap efektivitas kerja sama dengan dunia industri.
3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan terkait kolaborasi antara pendidikan vokasi dan sektor industri.
4. Merumuskan model kebijakan yang ideal untuk menyeimbangkan kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi guna meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

METODE PENELITIAN

Metode literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, menganalisis, dan mensintesis data atau informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti (Ridwan *et al.*, 2021).

Metode ini sering disebut juga sebagai studi kepustakaan (literature review), karena sumber utama data berasal dari literatur yang sudah ada, bukan dari pengumpulan data langsung di lapangan (Ridwan *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan seperti:

1. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional, mengenai kebijakan pendidikan vokasi, peran industri, dan otonomi lembaga pendidikan.
2. Sumber data penelitian ini adalah Literatur Primer: jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan vokasi (misalnya UU Sistem Pendidikan Nasional).
3. Teknik Analisis Data
Menggunakan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan literatur dalam beberapa tema, misalnya:
 - a. Kebijakan Pendidikan
 - b. Otonomi pendidikan vokasi.

- c. Peran Kepemilikan Industri
- d. Manfaat Sinergi Otonomi + Kepemilikan Industri

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan pendidikan dalam mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.

Kebijakan pendidikan yang mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi merupakan strategi pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (Saptadi *et al.*, 2025). Tujuan utamanya adalah agar pendidikan vokasi lebih relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong industri untuk berperan aktif tidak hanya sebagai pengguna tenaga kerja, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya dalam perencanaan kurikulum, penyediaan tempat magang, sertifikasi keahlian, hingga investasi bersama dalam fasilitas pembelajaran.

Di sisi lain, lembaga pendidikan vokasi diberikan otonomi yang lebih besar untuk mengelola program, menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal maupun global (Rosba *et al.*, 2025). Otonomi ini memungkinkan lembaga vokasi untuk lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta pasar tenaga kerja.

Secara keseluruhan, kebijakan ini berupaya menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga pendidikan vokasi tidak lagi berjalan terpisah dari kebutuhan nyata dunia kerja, melainkan menjadi bagian dari ekosistem industri yang produktif dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.

- a. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah mendorong keterlibatan industri melalui kebijakan seperti *link and match* dan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)*, yang memberi ruang bagi industri berperan dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan, serta memberi otonomi lebih besar pada lembaga vokasi untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Kebutuhan Dunia Industri
Industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai, sehingga mereka terdorong untuk ikut memiliki peran dalam proses pendidikan, seperti praktik kerja, sertifikasi, dan pengembangan teknologi di lembaga vokasi.
- c. Tuntutan Relevansi dan Mutu Pendidikan
Lembaga vokasi harus memastikan lulusannya relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, diperlukan otonomi agar lembaga bisa fleksibel, inovatif, dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan industri.
- d. Dukungan Pendanaan dan Kerja Sama
Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga vokasi dalam bentuk investasi bersama, *teaching factory*, atau pusat pelatihan industri mendorong kepemilikan bersama dan kemandirian lembaga.
- e. Perkembangan Teknologi dan Globalisasi
Kemajuan teknologi menuntut adanya pembaruan kurikulum dan sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern, sehingga kerja sama dan otonomi lembaga menjadi semakin penting.

- 3. Apa saja kendala yang di alami dalam mendorong kepemilikan industry dan otonomi pendidikan vokasi.**
- a. Kurangnya keterlibatan industri – Banyak industri belum aktif terlibat dalam penyusunan kurikulum, pelatihan, atau investasi karena lebih fokus pada kegiatan produksi dan keuntungan jangka pendek.
 - b. Keterbatasan kapasitas lembaga vokasi – Sebagian lembaga belum siap secara manajerial, finansial, dan sarana prasarana untuk mengelola otonomi secara mandiri dan efektif.
 - c. Kebijakan dan regulasi yang kurang fleksibel – Aturan pemerintah terkadang belum mendukung sepenuhnya otonomi lembaga dan kemitraan dengan industri, misalnya dalam hal pendanaan atau rekrutmen tenaga ahli dari luar kampus.
 - d. Perbedaan orientasi antara pendidikan dan industri – Dunia pendidikan berorientasi pada proses belajar, sedangkan industri fokus pada hasil dan efisiensi, sehingga sulit menyatukan kepentingan.
 - e. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi – Sebagian lembaga vokasi masih tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi industri 4.0 dan digitalisasi.

Berbicara soal kendala, Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut seperti dengan memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas lembaga, memperbaiki regulasi, memberi insentif kepada industri, dan mengadaptasi teknologi modern agar pendidikan vokasi lebih relevan dan mandiri.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan yang mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Namun, upaya ini masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya keterlibatan industri, keterbatasan kapasitas lembaga vokasi, serta regulasi yang belum fleksibel. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri, melalui peningkatan kerja sama, reformasi kebijakan, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini.

DAFTAR REFERENSI

- Al Mubarak, M., & Mustofa, B. (2025). Pendidikan Karakter Kunci Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya Saing di Indonesia Emas 2045. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(1), 65–77.
- Avana, N., Nerita, S., Rurisman, R., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2024). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(2), 322–338.
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 422–431.
- Ningrum, M. (2025). Efektivitas Kebijakan Link and Match dalam Pendidikan Vokasi: Menakar Kesiapan Lulusan Memasuki Dunia Kerja. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5(1), 51–58.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

- Rosba, E., Ramadhanti, D., Nurdin, B., Verius, J., Hastuti, Y., Darwanti, D., Yenti, O., Irma, M. A., Adisman, A., & Al-Ansari, A. R. (2025). *Pengembangan kurikulum vokasi*. Star Digital Publishing.
- Saptadi, N. T. S., Septiani, S., Wardoyo, T. H., Hidayati, W., Thoif, M., Talindong, A., Audia, F., Nashiroh, P. K., Hadikusumo, R. A., & Suroya, L. F. (2025). *Pendidikan Vokasional: Teori dan Praktik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yasin, M. (2024). Strategi Industrialisasi “Strategi Industri Pada Ekonomi Makro.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 1(6), 149–156.